

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DERAJAT DESENTRALISASI DAN
KETERGANTUNGAN KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL
(STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2014-2016)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

NUR FEBRIANTO

B 200 140 262

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DERAJAT DESENTRALISASI,
KETERGANTUNGAN KEUANGAN, TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2014-2016)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

NUR FEBRIANTO

B200140262

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Drs Wahyono, MA, AK

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DERAJAT DESENTRALISASI
DAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN TERHADAP
BELANJA MODAL**

**(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-
2016)**

OLEH

NUR FEBRIANTO

B 200 140 262

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis 07 Februari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Drs. Wahyono, MA, Ak
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Andi Dwi Bayu Bawono, SE, M.Si., Ph.D
(Anggota I Dewan penguji)**
- 3. Dr. Zulfikar, S.E., M.Si
(Anggota II Dewan penguji)**



Dr. Syamsudin, MM
NIDN. 017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 Februari 2019

Penulis



NUR FEBRIANTO

B200140262

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DERAJAT DESENTRALISASI DAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL
(STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014-2016)**

Abstrak

Dalam pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, maupun pendapatan asli daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendanaan yang bersumber dari daerah. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti secara empiris tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, Derajat Desentralisasi, dan Ketergantungan Keuangan terhadap Belanja Modal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan 3 tahun amatan. Sehingga total sampel yang diteliti adalah 51. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan DAU, DAK dan Ketergantungan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, *Derajat Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan dan Belanja Modal.*

Abstract

In regional expenditures can not be separated from the source of revenue, both in the form of balancing funds, regional loans, as well as local revenue. Balancing funds are funding originating from the APBN consisting of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), while Regional Original Income (PAD) is funding sourced from the regions. The purpose of this study is to obtain empirical evidence about the influence of PAD, DAU, DAK, the degree of decentralization, and financial dependence on capital expenditure. The type of research used is quantitative research. In this study the sampling method used was a saturated sample, that is, the entire population was used as the sample. The sample in this study amounted to 13 districts and 4 cities in South Sumatra Province with 3 years of observation. So that the total sample studied is 51. The method of data analysis used in this study is multiple linear regression. The results of this study indicate that PAD and the degree of decentralization have a significant effect on capital expenditure. Whereas DAU, DAK and Financial Dependence have no significant effect on Capital Expenditures.

Keywords: PAD, DAU, DAK, Degree of Decentralization, Reliance Financial and Capital Expenditures.

1. PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan adanya kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola dan merencanakan anggaran keuangannya secara mandiri untuk kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Agar pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai disinilah diperlukan alokasi belanja modal yang lebih tinggi.

Belanja modal dapat meningkatkan pelayanan publik dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah (pemda) agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen. Persentase tersebut bahkan lebih tinggi dua persen daripada target untuk 2013 yaitu 28 persen. namun masih banyak pemda yang merasa kesulitan untuk mencapai target tersebut (Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri:2013).

Berlakunya otonomi daerah sendiri diharapkan dapat memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dengan memberikan wewenang untuk mengembangkan potensi sumber daya yang di miliki suatu daerah secara efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat .

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak atau retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil), Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Heliyanto dan Nur ,2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan Heliyanto dan Nur (2017) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah penulis mengganti satu variabel yaitu dari Dana Bagi Hasil dengan Derajat Desentralisasi dan menambah satu variabel baru yaitu Ketergantungan Keuangan, penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2014-2016.

Sumatera Selatan sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang melimpah, diharapkan pengelolaan keuangan menjadi perhatian yang penting dalam memaksimalkan sumber daya serta potensi keuangan yang ada. Kondisi yang terjadi dalam realisasi penyerapan APBN untuk belanja modal di Sumatera Selatan tercatat baru 4% dari pagu senilai Rp. 3,01 pada triwulan II/2015 dalam media Bisnis.com. Menurut Setyawan, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) Kanwil Kementerian Keuangan Sumsel, belanja modal merupakan hal penting bagi daerah, karena komponen tersebut memiliki peran penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diakselerasi dengan belanja modal dan barang.

Peranan Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat serta penilaian kinerja keuangan pada pemerintahan. Salah satu diantaranya dalam kebijakan belanja modal yang dilakukan pada satu periode sebagai cerminan dalam peningkatan fasilitas, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Derajat Desentralisasi dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten atau Kota Sumatera Selatan Tahun 2014-2016)”.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen perimbangan keuangan daerah anggaran 2014-2016 melalui www.depkeu.djpk.go.id. Populasi dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK, derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan dan belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera

Selatan yang meliputi 13 kabupaten dan empat kota sehingga total populasi adalah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang menjadi sampel dalam penelitian. Metode non Probability Sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Metode analisa data dalam penelitian ini dengan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data Penelitian

Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2016	17
Sampel penelitian x 3 tahun	51
Data tidak wajar atau <i>Outlier</i>	(14)
Jumlah sampel	37

3.2 Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	8903213895,00	189584741246,00	80848768670,84	52292498574,34
DAU	110386837000,00	1049995034000,00	546047944648,65	211209861946,87
DAK	,00	377545536695,00	115531912420,68	99311207599,22
DD	2,00	11,00	6,05	2,538
KK	70,00	93,00	83,16	5,19
BM	198992372066,00	634278880940,00	368224141902,84	115620024667,63

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel IV.2 di atas, analisis deskriptif pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan nilai minimum sebesar 8.903.213.895 dan nilai maksimumnya 189.584.741.246 dengan nilai rata-rata 80.848.768.670 dan nilai standar deviasi sebesar 52.292.498.574, jadi ukuran penyebaran pendapatan asli daerah terdapat perbedaan terhadap belanja modal pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diteliti dalam kurun waktu tahun 2014-2016.

Hasil analisis dari statistik deskriptif terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum 110.386.837.000 dan nilai maksimum 1.049.995.034.000 dengan nilai rata-rata 546.047.944.648 serta standar deviasi sebesar 211.209.861.946, jadi ukuran penyebaran dana alokasi umum mengidentifikasi terdapat total dana alokasi umum berbeda antara satu dengan yang lainnya pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diteliti dalam kurun waktu tahun 2014-2016.

Hasil analisis dari statistik deskriptif terhadap dana alokasi khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 377.545.536.695 dengan nilai rata-rata 115.531.912.420 serta standar deviasi sebesar 99.311.207.599, jadi ukuran penyebaran dana alokasi umum mengidentifikasi terdapat total dana alokasi khusus berbeda antara satu dengan yang lainnya dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diteliti dalam kurun waktu tahun 2014-2016.

Hasil analisis dari statistik deskriptif terhadap derajat desentralisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 11,00 dengan nilai rata-rata 6,05 serta standar deviasi sebesar 2,538, berarti ukuran derajat desentralisasi mengidentifikasikan bahwa setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan kontribusi PAD pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diteliti dalam kurun waktu tahun 2014-2016.

Hasil analisis dari statistik deskriptif terhadap ketergantungan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum 70,00 dan nilai maksimum 93,00 dengan nilai rata-rata 83,16 serta standar deviasi sebesar 5,19, jadi ukuran penyebaran ketergantungan keuangan mengidentifikasi bahwa setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diteliti dalam kurun waktu tahun 2014-2016.

Hasil analisis dari statistik deskriptif terhadap belanja modal Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai minimum 198.992.372.066 dan nilai maksimum 634.278.880.940 dengan nilai rata-rata

368.224.141.902 serta nilai standar deviasi sebesar 115.620.024.667, berarti ukuran penyebaran belanja modal disetiap tahunnya pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diteliti dalam kurun waktu tahun 2014-2016.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0,224	4,470	Bebas Multikolinieritas
Dana Alokasi Umum	0,568	1,761	Bebas Multikolinieritas
Dana Alokasi Khusus	0,557	1,797	Bebas Multikolinieritas
Derajat Desentralisasi	0,247	4,042	Bebas Multikolinieritas
Ketergantungan Keuangan	0,984	1,016	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa hasil dari suatu perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10, hal ini menunjukkan tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil dari perhitungan nilai *variabel Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan nilai yang sama yaitu tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel dalam model regresi.

Tabel 4. Hasil Pengujian Autokorelasi

Durbin-Watson	dLtabel	dUtabel	keterangan
1.869	1.191	1.795	Tidak ada autokorelasi positif/negatif

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* dapat dilihat dari tabel nilai $dL = 1.191$, maka didapatkan $4 - dL$ yaitu $4 - 1.191 = 2.809$. Nilai $dU = 1.795$, maka didapat $4 - 1.795 = 2.205$. Nilai $DW = 1.869$, maka dapat disimpulkan nilai DW terletak diantara dU dan $4 - dU$ ($dU < DW < 4 - dU$) hal tersebut tidak menunjukkan suatu autokorelasi positif/negatif.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t_{hitung}	Sig.	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0,298	0,768	Bebas Heteroskedastisitas
Dana Alokasi Umum	1,224	0,230	Bebas Heteroskedastisitas
Dana Alokasi Khusus	-0,257	0,799	Bebas Heteroskedastisitas
Derajat Desentralisasi	0,122	0,903	Bebas Heteroskedastisitas
Ketergantungan Keuangan	0,332	0,742	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi pada parameter model penduga dan tidak ada nilai tingkat signifikansi atau $p\text{-value} < \alpha$ (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

	K-SZ	Sig.	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,643	0,803	Data terdistribusi normal

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 6 di atas nilai *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan sebesar 0,643 dengan nilai signifikan atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,803 > 0,05 ($p\text{-value} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal.

3.4 Uji Regresi Linier Berganda.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	B	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
Konstan	169067333056	0,798	± 2,026	0,431
Pendapatan Asli Daerah	2,709	5,382		0,000
Dana Alokasi Umum	0,004	0,058		0,954
Dana Alokasi Khusus	-0,024	-0,142		0,888
Derajat Desentralisasi	-28870804172	-2,928		0,006
Ketergantungan Keuangan	1866925097	0,772		0,446
R ² = 0,641 F _{hitung} = 11,058				
Adjusted = 0,583 Sig. F / Prob = 0,000				
R ²				

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil dari tabel IV.7 di atas dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BM} = & 169067333056 + 2,709\text{PAD} + 0,004\text{DAU} - 0,024\text{DAK} - \\ & 28870804172\text{DD} + 1866925097\text{KK} + \epsilon \end{aligned} \quad (1)$$

Dengan menggunakan hasil regresi persamaan tersebut, hasil analisis dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai dari konstanta untuk persamaan regresi ini adalah 169.067.333.056. Hal ini menunjukkan jika pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, derajat desentralisasi, dan ketergantungan keuangan dianggap konstan dan besarnya belanja modal akan meningkat, begitu pula sebaliknya.
- b. Koefisien regresi dari pendapatan asli daerah sebesar 2,709. Tanda positif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 2,709, maka akan mengakibatkan terjadi peningkatan pada belanja modal sebesar 2,709, begitu juga sebaliknya.
- c. Koefisien regresi dari dana alokasi umum sebesar 0,004. Tanda positif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap dana alokasi umum, maka akan mengakibatkan terjadi peningkatan pada belanja modal sebesar 0,004, begitu juga sebaliknya.
- d. Koefisien regresi dari dana alokasi khusus adalah -0,024. Tanda negatif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap dana alokasi khusus sebesar -0,024, maka akan mengakibatkan terjadi penurunan pada belanja modal sebesar -0,024, begitu juga sebaliknya.
- e. Koefisien regresi dari derajat desentralisasi adalah -28,870,804,172. Tanda negatif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap derajat desentralisasi, maka akan mengakibatkan terjadi penurunan pada belanja modal, begitu juga sebaliknya.
- f. Koefisien regresi dari ketergantungan keuangan adalah 1.866.925.097. Tanda positif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap derajat desentralisasi sebesar 1.866.925.097, maka akan mengakibatkan terjadi peningkatan pada belanja modal sebesar 1.866.925.097, begitu juga sebaliknya.

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan terhadap belanja modal pada tabel IV.7 dengan nilai F_{hitung} sebesar 11,058 > nilai F_{tabel} sebesar 2,52 dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$, maka pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, derajat desentralisasi, dan ketergantungan keuangan berpengaruh bersama sama (simultan) terhadap belanja modal. Hal ini juga bisa diartikan bahwa model regresi yang digunakan sudah sesuai dengan datanya.

3.5.2 Uji t

Pendapat Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel IV.7 pada variabel pendapatan asli daerah diperoleh t_{hitung} sebesar 5,382 > t_{tabel} 2,026 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < \text{batas signifikan sebesar } 0,05$, maka H_1 diterima. Hal tersebut berarti pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal terbukti.

Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel IV.7 pada variabel dana alokasi umum diperoleh t_{hitung} sebesar $0,058 < t_{tabel}$ sebesar 2,026 dengan nilai signifikan sebesar $0,954 > \text{batas signifikan sebesar } 0,05$, maka H_2 ditolak. Hal tersebut berarti dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tidak terbukti.

Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel IV.7 pada variabel dana alokasi khusus diperoleh t_{hitung} sebesar $-0,142 < t_{tabel}$ sebesar 2,026 dengan nilai signifikan sebesar $0,888 > \text{batas signifikan sebesar } 0,05$, maka H_3 ditolak. Hal tersebut berarti dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis

ketiga yang menyatakan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tidak terbukti.

Derajat Desentralisasi Terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel IV.7 pada variabel derajat desentralisasi diperoleh t_{hitung} sebesar $-2,928 < t_{tabel}$ sebesar $-2,026$ dengan nilai signifikan sebesar $0,006 < \text{batas signifikan}$ sebesar $0,05$, maka H_4 diterima. Hal tersebut menunjukkan derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal terbukti.

Ketergantungan Keuangan Terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian uji t pada tabel IV.7 pada variabel ketergantungan keuangan diperoleh t_{hitung} sebesar $0,772 < t_{tabel}$ sebesar $2,026$ dengan nilai signifikan sebesar $0,446 > \text{batas signifikan}$ sebesar $0,05$, maka H_5 ditolak. Hal tersebut menunjukkan ketergantungan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan ketergantungan keuangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tidak terbukti.

3.5.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (*fit of Goodness*) yang dinotasikan dengan R^2 digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variabel dan mengukur seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara nol sampai satu, semakin mendekati angka satu dapat dikatakan model tersebut semakin baik dan dapat dikatakan signifikan. Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, derajat desentralisasi, dan ketergantungan keuangan terhadap belanja modal pada tabel IV.7 sebesar $0,583$, dalam hal ini model dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, derajat desentralisasi, dan ketergantungan keuangan sebesar $58,3\%$, sedangkan sisanya sebesar $41,7\%$ dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam data penelitian ini.

3.6 Pembahasan

3.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis data di atas, pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikan $< 0,05$ yaitu sebesar 0,000. Jadi penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan oleh suatu daerah, maka semakin besar pula daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Selain itu, pengeluaran pemerintah daerah terhadap belanja modal juga akan semakin meningkat, sehingga aset yang dimiliki pemerintah daerah tersebut akan bertambah jadi kekayaan aset daerah.

Peningkatan dana pemerintah daerah yang berasal dari sumber penerimaan asli daerah telah digunakan secara tepat untuk membiayai pembangunan daerah maupun peningkatan sarana dan prasarana dengan meningkatkan alokasi belanja modal dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik. Namun demikian pengembangan dan penggalian potensi PAD merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, mengingat pendapatan asli daerah sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab di daerah, serta dapat berperan penting dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

3.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis data di atas, dana alokasi umum memiliki tingkatan signifikan $> 0,05$ yaitu sebesar 0,954. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan dana transfer dalam (DAU) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka akan semakin meningkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang menjadi alokasi untuk belanja modal.

Pemberian dana transfer pemerintah pusat seperti DAU seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan dan pembangunan pemerintah daerah.

Peningkatan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, selain digunakan sebagai alokasi belanja pegawai juga dialokasikan untuk peningkatan belanja modal guna meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada publik.

3.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil dari analisis data di atas, dana alokasi khusus memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,888. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa, peningkatan dana transfer dalam (DAK) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan semakin meningkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang menjadi alokasi untuk belanja modal.

Pemberian dana transfer pemerintah seperti DAK seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Karena pelaksanaan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang yang digunakan dalam pelayanan publik.

3.6.4 Pengaruh Derajat Desentralisasi Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis data di atas, derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dimana nilai signifikan $< 0,05$ yaitu sebesar 0,006 namun memiliki *Standardized Coefficients Beta* -2887,081. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi maka akan menurunkan alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti bahwa realisasi PAD yang diterima oleh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan belum secara optimal dialokasikan untuk belanja modal, dengan kata lain, dana tersebut hanya digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja operasional.

Belanja modal sendiri sampai saat ini lebih banyak berasal dari belanja transfer (Dana Perimbangan) sehingga semakin tinggi belanja transfer maka akan semakin tinggi pula nilai belanja modal.

3.6.5 Pengaruh Ketergantungan Keuangan Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis data di atas, ketergantungan keuangan memiliki nilai signifikan $> 0,05$ yaitu sebesar 0,446. Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa, dengan ketergantungan yang rendah, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi maka kemampuan keuangan pemerintah daerahnya cukup baik, sehingga pengalokasian belanja modal lebih besar. Karena ketergantungan keuangan diperoleh dari hasil pembagian antara pendapatan transfer dengan total pendapatan. Pendapatan transfer merupakan bagian dari total pendapatan pemerintah provinsi secara keseluruhan. Namun pendapatan transfer sendiri bukan merupakan sumber pendapatan utama bagi pelaksanaan program pemerintah.

Rasio ini merupakan perbandingan dari total realisasi pendapatan transfer dengan total realisasi pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

4. PENUTUP

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, derajat desentralisasi, dan ketergantungan keuangan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1 Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$
- 4.2 Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dengan nilai signifikansi $0,954 > 0,05$
- 4.3 Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dengan nilai signifikansi $0,888 > 0,05$
- 4.4 Derajat desentralisasi berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan $0,006 < 0,05$
- 4.5 Ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan $0,446 > 0,05$

Dari hasil penelitian analisis data, pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan atau kelemahan yang ada, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

- 4.1 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup yang luas agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi dan tidak hanya dengan data statistik dan informasi tertulis tentang APBD saja, tapi bisa memberikan suatu gambaran yang lebih riil mengenai belanja modal daerah dengan menggunakan laporan realisasi anggaran dari berbagai instansi terkait.
- 4.2 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya dan juga variabel moderating maupun intervening sebagai bagian dari interaksi yang mampu menjelaskan secara maksimal variasi terhadap variabel dependen.
- 4.3 Penelitian mendatang diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder laporan data sensus terbaru yang didapatkan dari data realisasi anggaran Kemendagri dan masing-masing pemerintah daerah, tetapi bisa menggunakan metode observasi atau pengamatan secara langsung mengenai obyeknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Y. Nanda dan Novi. 2017. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015”*. KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017.
- Arsa, I Ketut dan Nyoman. 2015. *“Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 – 2013”*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2.
- Bastian, Indrianto 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1, BPFE: Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heliyanto Firnandi dan Nur. 2016. *“Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 5 No. 3, ISSN 2460-0585.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Setiawan, Asrul Wisnu. 2015. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Yogyakarta Periode Tahun 2007-2017*". Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

www.djpk.depkeu.go.id